

Kebijakan Makan Bergizi Gratis Di Provinsi Kalimantan Tengah: Kajian Filosofis Ekonomi Islam

Free Nutritious Meal Policy in Central Kalimantan Province: A Philosophical Study of Islamic Economics

Hasanatul Munawarah¹

Ahmad Dakhoir²

*¹UIN PALANGKA RAYA, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

²UIN PALANGKA RAYA, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

*email:

¹hasanatulmunawarah2510310051@uin-palangkaraya.ac.id

²ahmad.dakhoir@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menuai pro dan kontra, terutama dalam konteks implementasinya di Provinsi Kalimantan Tengah. Urgensi kajian ini didasarkan pada sejumlah fakta empiris: anggaran MBG nasional 2026 mencapai Rp335 triliun, namun realisasi 2025 baru mencapai 72,5% dari pagu; di Kalimantan Tengah terdapat 87 SPPG aktif per Februari 2026 jauh dari kebutuhan 169 SPPG; serta beberapa insiden keracunan makanan yang mencederai kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan MBG di Kalimantan Tengah melalui analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dengan bahan kajian utama berupa narasi pemberitaan media dan dokumen kebijakan. Kerangka analisis mengintegrasikan perspektif filosofis ekonomi Islam (ontologi, epistemologi, aksiologi) serta teori ekonomi mikro dan makro. Temuan menunjukkan bahwa MBG di Kalimantan Tengah menghadapi polemik pada enam dimensi: anggaran, ketersediaan pangan, distribusi, kualitas menu, koordinasi, dan transparansi. Secara ontologis, program ini selaras dengan prinsip pemenuhan kebutuhan dasar (*dharuriyat*); secara epistemologis, pengambilan keputusan masih lemah dalam hal basis data; secara aksiologis, ketimpangan distribusi menunjukkan belum terpenuhinya nilai keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola berbasis nilai-nilai ekonomi Islam untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan program.

Kata Kunci:

Polemik

Kebijakan Makan Bergizi Gratis

Filosofis Ekonomi Islam

Keywords:

Polemik

Free Nutritious Meal Policy

Philosophy of Islamic Economics

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a Prabowo-Gibran government policy that has drawn both pros and cons, especially in the context of its implementation in Central Kalimantan Province (Kalimantan Tengah). The urgency of this study is based on several empirical facts: the 2026 national MBG budget reached IDR 335 trillion, but the 2025 realization only reached 72.5% of the ceiling; in Central Kalimantan there were 87 active SPPGs as of February 2026, far from the required 169 SPPGs; and several food poisoning incidents that have damaged public trust. This study aims to analyze the polemics of the MBG policy in Central Kalimantan through qualitative content analysis with the main study materials in the form of media news narratives and policy documents. The analytical framework integrates the philosophical perspective of Islamic economics (ontology, epistemology, axiology) as well as micro and macroeconomic theories. The findings show that the MBG in Central Kalimantan faces polemics in six dimensions: budget, food availability, distribution, menu quality, coordination, and transparency. Ontologically, this program is aligned with the principle of fulfilling basic needs (*dharuriyat*); Epistemologically, decision-making remains weak in terms of data base; axiologically, disparity in distribution indicates the unfulfilled values of justice (*'adl*) and welfare (*maslahah*). This study recommends strengthening governance based on Islamic economic values to ensure the sustainability and fairness of the program.



PENDAHULUAN

Permasalahan gizi buruk dan kerawanan pangan tetap menjadi tantangan global yang signifikan. Berdasarkan laporan *State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025* yang diterbitkan oleh FAO, WHO, UNICEF, dan WFP, diperkirakan sebanyak 673 juta orang di dunia mengalami kelaparan kronis pada 2024-2025. Di tingkat nasional,

Indonesia mencatat prevalensi stunting sebesar 19,8% pada tahun 2024 menurut data Kemenkes per November 2025 dan angka ini menempatkan Indonesia pada posisi yang memerlukan intervensi kebijakan gizi berkelanjutan. Di Kalimantan Tengah, prevalensi stunting pada balita mencapai 22,1% (SSGI, 2024), melampaui rata-rata nasional, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai salah satu wilayah prioritas perbaikan gizi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi salah satu kebijakan publik paling disoroti. Dengan alokasi anggaran nasional Rp71 triliun pada tahun 2025 yang kemudian meningkat menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026, program ini menargetkan anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui (Qomarrullah dkk., 2025). Secara nasional, program ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, realisasi anggaran 2025 hanya mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu (pernyataan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono), mengindikasikan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan.

Di tingkat daerah, potret implementasi MBG di Kalimantan Tengah menyajikan sejumlah fakta yang memerlukan analisis mendalam. Per Februari 2026, Kalimantan Tengah baru memiliki 87 SPPG aktif, sementara kebutuhan berdasarkan data peserta didik (Dapodik 2025) adalah 169 SPPG ini berarti baru sekitar 51% dari kebutuhan yang terpenuhi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan Rp200 miliar untuk MBG tahun 2025, namun alokasi ini menuai kritik publik mengingat masih adanya guru honorer bergaji Rp150.000 per bulan, infrastruktur jalan yang rusak, dan persoalan sanitasi yang belum tertangani. Selain itu, sejumlah insiden keracunan makanan yang melibatkan peserta MBG di antaranya 27 siswa SDN 3 Bukit Tunggal (September 2025), temuan ulat di MTsN 1 Palangka Raya (November 2025), dan keracunan di Posyandu Harum Manis menambah kompleksitas polemik ini.

Kajian tentang MBG di Indonesia berkembang pesat dalam dua tahun terakhir. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada dimensi pendidikan (Alburrarrahim dkk., 2025; Tambunan dkk., 2025), implementasi hukum (Fikri, 2025; Hakim & Yuliana, 2025), serta analisis sentimen publik berbasis komputasional (Firmansyah dkk., 2025; Haikal & Erfina, 2026; Ramadhan & Khoirunnisa, 2025). Penelitian dari perspektif filosofis ekonomi Islam masih sangat terbatas. Beberapa kajian yang relevan, seperti Virlana & Tjoneng (2025) yang membahas pemanfaatan dana zakat untuk MBG, dan Kiftiyah dkk. (2025) yang mengkaji keadilan sosial dalam dinamika sosio-politik MBG, belum menyentuh dimensi filosofis secara komprehensif, khususnya di konteks Kalimantan Tengah. Sementara itu, kajian dari perspektif analisis isi pemberitaan media dalam kerangka ekonomi Islam juga belum ada, padahal konstruksi narasi media sangat mempengaruhi persepsi publik dan legitimasi kebijakan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan tiga kontribusi utama: (1) mengkaji polemik MBG di Kalimantan Tengah melalui analisis isi kualitatif terhadap narasi pemberitaan dan dokumen kebijakan; (2) menganalisis kebijakan MBG dari kerangka filosofis ekonomi Islam (ontologi, epistemologi, aksiologi); dan (3) mengintegrasikan analisis ekonomi mikro-makro dalam evaluasi kebijakan yang berdimensi etis. Pendekatan ini diharapkan memberikan kerangka analisis yang lebih holistik, berkelanjutan, dan relevan secara normatif.

KAJIAN TEORI

1. Teori Ekonomi Islam: Konsep Dasar, Prinsip, dan Perbedaan dengan Ekonomi Konvensional

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, meliputi tauhid (keesaan Allah), keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebebasan yang bertanggung jawab (Karim, 2014). Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada tujuan dan nilai-nilai yang mendasarinya. Ekonomi konvensional cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan (*utility maximization*), sedangkan ekonomi Islam menekankan pada pencapaian kesejahteraan komprehensif (*falah*) yang meliputi aspek material dan spiritual (Chapra, 2000).

Salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam adalah *maqashid al-syariah* (tujuan syariah), yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al-Ghazali, dalam Chapra, 2000). Dalam konteks kebijakan pangan dan gizi, MBG dapat dilihat sebagai instrumen untuk memenuhi *hifz al-nafs* (menjaga eksistensi jasmani) dan *hifz al-aql* (mengembangkan potensi intelektual melalui pemenuhan gizi otak). Prinsip zakat sebagai mekanisme redistribusi pendapatan (Kahf, 1989) juga relevan dalam pembahasan alternatif pendanaan MBG yang berkelanjutan (Virlana & Tjoneng, 2025).

2. Filsafat Ekonomi Islam: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dalam Ekonomi Islam

Filsafat ekonomi Islam memberikan landasan konseptual dan metodologis bagi pengembangan sistem ekonomi Islam. Ontologi ekonomi Islam berkaitan dengan hakikat realitas ekonomi yang didasarkan pada pandangan dunia Islam (*worldview*). Dalam pandangan ini, manusia adalah *khalifah* (wakil) Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan adil (Naqvi, 1981). Implikasi ontologis ini adalah bahwa kebijakan ekonomi harus berpijak pada tujuan ilahiah, bukan semata pada efisiensi material.

Epistemologi ekonomi Islam berkaitan dengan metode memperoleh pengetahuan tentang fenomena ekonomi. Ekonomi Islam mengakui wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) sebagai sumber pengetahuan utama di samping akal dan pengalaman empiris (Mannan, 1986). Dalam konteks analisis kebijakan, epistemologi Islam menuntut bahwa pengambilan keputusan harus didasarkan pada data yang akurat, komprehensif, dan mempertimbangkan nilai-nilai etis bukan hanya kalkulasi untung-rugi (Beekun, 1997). Aksiologi ekonomi Islam berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari tindakan

ekonomi, mencakup keadilan (*'adl*), kejujuran (*amanah*), kerjasama (*ta'awun*), dan kepedulian sosial yang mengacu pada prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum).

3. Teori Ekonomi Mikro dan Makro

Untuk menganalisis program MBG dari perspektif ekonomi, kajian ini merujuk pada teori konsumsi (*consumer theory*) yang menjelaskan bagaimana individu dan keluarga mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan makanan bergizi (Mankiw, 2018). Dalam ekonomi mikro, MBG berpotensi menggeser kurva permintaan terhadap bahan pangan bergizi, mendorong peningkatan produksi lokal, dan menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) bagi petani dan UMKM pangan lokal (Basit & Ramadani, 2025).

Dalam perspektif ekonomi makro, MBG berdampak pada tiga variabel utama: (1) pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi sumber daya manusia jangka panjang (Albaburrahim dkk., 2025); (2) tekanan inflasi jika ekspansi permintaan tidak diimbangi peningkatan produksi pangan; dan (3) defisit anggaran jika pendanaan bergantung sepenuhnya pada APBN dan APBD. Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa investasi modal manusia—termasuk melalui perbaikan gizi—merupakan determinan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kerangka ini relevan untuk mengevaluasi cost-benefit MBG secara komprehensif.

4. Dialog dengan Penelitian Terdahulu tentang MBG

Kajian tentang MBG dari perspektif implementasi kebijakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Agustini (2025) mengkaji efektivitas dan tantangan MBG sebagai intervensi pendidikan, menemukan bahwa kendala utama terletak pada koordinasi antar lembaga dan ketersediaan bahan pangan lokal. Temuan ini sejalan dengan kajian Febriyanti dkk. (2025) tentang kolaborasi multi-aktor di Kota Magelang, serta Jalaludin dkk. (2026) tentang dinamika collaborative governance di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini memperluas temuan-temuan tersebut dengan menerapkannya pada konteks Kalimantan Tengah yang memiliki tantangan geografis unik.

Dari perspektif hukum, Fikri (2025) menganalisis MBG dalam kerangka konstitusionalisme, sementara Hakim & Yuliana (2025) mengkaji implikasi yuridis Perpres No. 83 Tahun 2024. Kedua kajian ini berguna sebagai referensi normatif, namun tidak membahas dimensi etis-filosofis secara mendalam. Kajian Kiftiyah dkk. (2025) tentang keadilan sosial dan dinamika sosio-politik MBG merupakan yang paling dekat dengan perspektif normatif, namun belum menggunakan kerangka filosofis Islam secara sistematis. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan ketiga dimensi filosofis (ontologi, epistemologi, aksiologi) dalam satu bingkai analisis yang koheren.

Dari sisi analisis media, Nasution (2026) melakukan analisis isi terhadap pemberitaan MBG di Kompas.id dengan fokus kepedulian sosial—sebuah pendekatan yang mendekati metode yang digunakan dalam penelitian ini. Namun kajian Nasution bersifat kuantitatif dan tidak mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan analisis isi kualitatif yang memadukan pemberitaan media dengan kerangka filosofis ekonomi Islam, serta menempatkan Kalimantan Tengah sebagai konteks spesifik yang belum banyak diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pilihan metode ini didasarkan pada argumentasi berikut: pertama, objek kajian bersifat tekstual narasi pemberitaan media dan dokumen kebijakan—yang lebih tepat dianalisis secara kualitatif untuk menangkap makna, konteks, dan nilai yang terkandung (Mayring, 2000; Krippendorff, 2004); kedua, pendekatan analisis isi kualitatif memungkinkan integrasi kerangka teoritis deduktif (filosofis ekonomi Islam) dengan temuan induktif dari data, sehingga menghasilkan analisis yang lebih kaya daripada sekadar analisis frekuensi; ketiga, keterbatasan akses terhadap data primer lapangan di wilayah Kalimantan Tengah yang luas menjadikan analisis dokumen sebagai strategi yang valid dan relevan (Creswell, 2014).

Bahan kajian (*corpus*) dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori: (1) Corpus narasi pemberitaan: artikel berita dan laporan jurnalistik tentang MBG di Kalimantan Tengah dari media daring (Kompas, Tribun Kalimantan Tengah, Antara, CNN Indonesia) periode Januari 2025-Maret 2026, dokumen resmi BGN, laporan SPPG Kalimantan Tengah, data Dapodik 2025, dan pernyataan resmi pejabat daerah, serta laporan insiden keracunan yang didokumentasikan secara publik. (2) Corpus bahan kajian filosofis: literatur ekonomi Islam (Karim, 2014; Chapra, 2000; Naqvi, 1981; Mannan, 1986; Beekun, 1997; Kahf, 1989) digunakan sebagai referensi teori untuk membangun kerangka analisis filosofis; dan literatur ekonomi mikro-makro (Mankiw, 2018; Todaro & Smith, 2015) digunakan sebagai referensi teori untuk analisis dampak ekonomi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui empat tahapan: (1) penelusuran sistematis menggunakan basis data elektronik (Google Scholar, Garuda, SINTA) dengan kata kunci 'Makan Bergizi Gratis', 'MBG Kalimantan Tengah', 'kebijakan pangan Kalimantan Tengah', dan kombinasinya; (2) seleksi bahan berdasarkan kriteria relevansi topik, kredibilitas sumber, dan kesesuaian periode waktu; (3) pengumpulan data dari sumber yang telah diseleksi; dan (4) pencatatan terstruktur dalam format matriks analisis yang memisahkan data empiris dari data teoritis.

Teknik analisis dilakukan dalam empat langkah yang mengadaptasi prosedur analisis isi kualitatif terarah (*directed qualitative content analysis*) dari Hsieh dan Shannon (2005): (1) Pengembangan kategori koding awal berdasarkan tiga dimensi filosofis (ontologi, epistemologi, aksiologi) dan enam tema polemik yang teridentifikasi dari corpus pemberitaan; (2) Koding dan kategorisasi setiap unit analisis (paragraf atau pernyataan) dikodekan ke dalam kategori yang relevan; (3) Analisis tema silang dengan mengidentifikasi pola dan hubungan antar kategori yang muncul dari data; dan (4) Sintesis dan

interpretasi dengan merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan analisis yang dikonfirmasi dengan kerangka teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Polemik Terkait Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Tengah

Analisis isi kualitatif terhadap *corpus* narasi pemberitaan dan dokumen kebijakan mengidentifikasi enam tema polemik utama yang membangun diskursus publik tentang MBG di Kalimantan Tengah. Keenam tema ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk narasi yang kompleks tentang kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realitas implementasi.

a. Polemik Anggaran dan Prioritas Fiskal

Narasi pemberitaan secara konsisten menempatkan persoalan anggaran sebagai titik sentral polemik. Alokasi Rp200 miliar dari APBD Kalimantan Tengah untuk MBG 2025 dikontraskan dengan kondisi guru honorer bergaji Rp150.000 per bulan, infrastruktur jalan yang rusak, pengelolaan sampah yang belum optimal, dan tanggungan BPJS Kesehatan masyarakat. Kontradiksi ini menciptakan narasi 'trade-off prioritas fiskal' yang dominan dalam pemberitaan lokal. Pada level nasional, realisasi anggaran MBG 2025 sebesar Rp51,5 triliun (72,5% dari pagu Rp71 triliun) mengindikasikan kesenjangan kapasitas serapan (Kiftiyah dkk., 2025; Bintari & Tjoneng, 2025).

b. Ketersediaan Bahan Pangan dan Tantangan Geografis

Kalimantan Tengah memiliki karakteristik geografis yang didominasi hutan dan perairan dengan aksesibilitas terbatas. Beberapa kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, seperti Bukit Santuai, Antang Kalang, dan Telaga Antang, masuk kategori daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Narasi pemberitaan menggambarkan sulitnya pasokan bahan pangan segar ke wilayah-wilayah ini secara konsisten dan tepat waktu (Qomarrullah dkk., 2025). Kondisi ini menciptakan paradoks: program yang dirancang untuk pemerataan gizi justru sulit menjangkau wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi.

c. Ketimpangan Distribusi dan Keadilan Spasial

Data Dapodik 2025 mencatat 592.576 peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA di Kalimantan Tengah. Dengan rasio standar BGN, provinsi ini membutuhkan 169 SPPG khusus anak sekolah belum termasuk kelompok Balita, Bumil, dan Busui (3B). Kenyataannya, per Februari 2026, hanya tersedia 87 SPPG (51,5% dari kebutuhan), dengan distribusi yang cenderung terkonsentrasi di perkotaan. Narasi pemberitaan menegaskan bahwa wilayah pelosok dan pedalaman masih jauh dari jangkauan program (Agustini, 2025). Ketimpangan ini menghasilkan narasi ketidakadilan spasial yang kuat dalam diskursus publik lokal.

d. Kualitas Menu dan Insiden Keamanan Pangan

Kualitas menu menjadi tema yang paling banyak mendapatkan perhatian media karena terhubung langsung dengan insiden konkret yang dapat divisualisasikan. Analisis isi mengidentifikasi tiga jenis narasi: (1) keluhan menu tidak variatif, kurang enak, atau berbau; (2) temuan benda asing kasus ulat di MTsN 1 Palangka Raya (November 2025); dan (3) insiden keracunan 27 siswa SDN 3 Bukit Tunggul (September 2025) dan keracunan di Posyandu Harum Manis, Palangka Raya. Insiden-insiden ini bukan hanya soal keamanan pangan teknis, melainkan juga membangun narasi tentang lemahnya pengawasan dan ketidakmampuan SPPG dalam memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) (Widyadhana dkk., 2025; Riyanto & Sinaga, 2025).

e. Koordinasi Kelembagaan yang Belum Optimal

Narasi pemberitaan secara berulang menyorot absennya kantor fisik BGN di Kalimantan Tengah sebagai akar masalah koordinasi. Kondisi ini menciptakan fragmentasi dalam pengawasan teknis dan komunikasi antara pusat dan daerah. Belum adanya sistem pengawasan berjenjang yang melibatkan Dinas Kesehatan, BPOM, dan Dinas Pendidikan serta ambiguitas tanggung jawab antar dinas memperkuat narasi tentang lemahnya arsitektur kelembagaan program. Pola ini sejalan dengan temuan Febriyanti dkk. (2025) dan Jalaludin dkk. (2026) tentang pentingnya *collaborative governance* dalam program serupa di daerah lain.

f. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Per Maret 2026, mayoritas SPPG di Kalimantan Tengah belum memiliki website yang dapat diakses publik untuk memantau laporan keuangan, baik untuk bahan makanan maupun biaya operasional. Banyak SPPG juga belum memiliki media sosial yang memuat data gizi harian dan harga pembelian bahan makanan—menimbulkan pertanyaan publik tentang kesesuaian dengan standar nilai per porsi dan kemungkinan markup harga. Narasi tentang potensi korupsi dan penyalahgunaan dana hadir, meski belum disertai bukti yang kuat secara yuridis (Fikri, 2025). Absennya transparansi ini memperlemah legitimasi program di mata publik.

2. Analisis Filosofis Ekonomi Islam terhadap Kebijakan MBG

a. Dimensi Ontologis: Keselarasan dengan Prinsip Dharuriyat

Dari perspektif ontologis ekonomi Islam, tujuan MBG—meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak—secara esensial selaras dengan konsep dharuriyat (kebutuhan primer) dalam *maqashid al-syariah*. Pemenuhan kebutuhan pangan

bergizi merupakan instrumen penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pengembangan akal (*hifz al-aql*). Ontologi Islam memandang bahwa negara—sebagai representasi institusi khalifah kolektif—memiliki kewajiban moral untuk memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi (Naqvi, 1981). Dalam kerangka ini, MBG bukan sekadar program sosial, melainkan manifestasi dari tanggung jawab negara yang bersumber dari prinsip kekhilafahan.

Namun, analisis isi pemberitaan menunjukkan bahwa polemik anggaran dan distribusi mengindikasikan adanya ketegangan antara cita-cita ontologis (semua berhak gizi baik) dan realitas implementasi (tidak semua terlayani). Ini menunjukkan bahwa keselarasan ontologis di level tujuan belum diimbangi dengan keselarasan pada level mekanisme dan distribusi.

b. Dimensi Epistemologis: Kelemahan Basis Data Pengambilan Keputusan

Epistemologi Islam menuntut bahwa pengambilan keputusan kebijakan didasarkan pada ilmu yang komprehensif dan akurat (Mannan, 1986). Analisis isi terhadap corpus pemberitaan dan dokumen kebijakan mengungkap sejumlah kelemahan epistemologis: (1) data status gizi anak usia sekolah penerima manfaat MBG di Kalimantan Tengah belum tersedia secara sistematis dan akurat, sehingga efektivitas program sulit diukur; (2) perencanaan jumlah SPPG (target 169, realisasi 87) menunjukkan bahwa basis data awal tidak diterjemahkan secara memadai ke dalam kapasitas implementasi; dan (3) insiden keracunan yang berulang mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan berbasis data (monitoring dan evaluasi) yang seharusnya menjadi piranti epistemologis kebijakan.

Dalam perspektif Islam, ketiadaan data yang akurat bukan hanya soal teknis-administratif, melainkan juga persoalan amanah (kejujuran) dalam pengelolaan kebijakan publik. Pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan ilmu yang memadai berpotensi menghasilkan kebijakan yang *zhulm* (menzalimi) meski tidak disengaja.

c. Dimensi Aksiologis: Ketidakesesuaian dengan Nilai 'Adl dan Masalah

Aksiologi ekonomi Islam menekankan nilai-nilai keadilan (*'adl*), kejujuran (amanah), dan kemaslahatan umum (masalah) sebagai panduan tindakan ekonomi (Beekun, 1997). Analisis isi mengungkap bahwa dari perspektif aksiologis, implementasi MBG di Kalimantan Tengah masih jauh dari ideal. Ketimpangan distribusi di mana 48,5% peserta didik belum terlayani SPPG dan wilayah pelosok tertinggal merupakan bentuk ketidakadilan spasial (*'adam al-'adl al-maka'ni*). Absennya transparansi anggaran bertentangan dengan nilai amanah. Sementara insiden keracunan dan kualitas menu yang tidak memadai menunjukkan bahwa masalah yang hendak dicapai belum sepenuhnya terwujud bahkan program ini, dalam beberapa kasus, justru berpotensi menimbulkan mudarat (kerugian) bagi penerima manfaat.

Namun, dari perspektif aksiologis yang lebih luas, narasi positif tentang penurunan stunting secara nasional dari data Balita Gizi Kurang dan Buruk yang menunjukkan tren penurunan (2025) menunjukkan bahwa potensi masalah program ini nyata, meski belum merata. Ini mengisyaratkan perlunya perbaikan mekanisme, bukan penghentian program.

3. Analisis Ekonomi Mikro dan Makro

Dari perspektif ekonomi mikro, MBG berpotensi menggeser kurva permintaan terhadap bahan pangan bergizi sayuran, buah, dan produk hewani sehingga mendorong peningkatan produksi dan harga di tingkat petani lokal. Hal ini dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah jika pengadaan bahan baku diprioritaskan dari sumber lokal (Basit & Ramadani, 2025). Di Kalimantan Tengah, kebijakan penggunaan bahan pangan lokal berpotensi memberdayakan petani dan UMKM di wilayah pedalaman, meski kendala akses pasar dan infrastruktur masih menjadi hambatan.

Secara ekonomi makro, investasi gizi melalui MBG sejalan dengan teori modal manusia (*human capital theory*) yang menghubungkan perbaikan gizi anak dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja di masa depan (Todaro & Smith, 2015; Albaburrahim dkk., 2025). Namun ekspansi belanja pemerintah yang signifikan Rp335 triliun pada 2026 berpotensi menimbulkan tekanan inflasi pada sektor pangan jika tidak diimbangi peningkatan produksi. Manajemen fiskal yang prudent, diversifikasi sumber pendanaan (termasuk dari dana zakat sebagaimana diusulkan Virlana & Tjoneng, 2025), dan penguatan rantai pasok pangan lokal menjadi faktor kritis keberhasilan makroekonomi program ini.

4. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis analisis isi kualitatif dan kerangka filosofis ekonomi Islam, penelitian ini merumuskan empat kelompok rekomendasi kebijakan:

Pertama, penguatan basis data dan sistem epistemologi kebijakan: BGN perlu membangun sistem informasi gizi yang terintegrasi di Kalimantan Tengah, mencakup data status gizi penerima manfaat (anak sekolah dan kelompok 3B), kapasitas produksi SPPG, dan indikator kualitas pangan. Basis data ini menjadi prasyarat epistemologis bagi pengambilan keputusan yang amanah.

Kedua, percepatan pemenuhan SPPG dan pemerataan distribusi: Target 169 SPPG di Kalimantan Tengah perlu dipenuhi secara bertahap dengan prioritas daerah 3T. Pembentukan SPPG berbasis komunitas di wilayah pedalaman, dengan melibatkan potensi lokal (petani, ibu PKK, pesantren), dapat menjadi solusi yang sesuai dengan prinsip *ta'awun* (kerjasama) dalam ekonomi Islam.

Ketiga, penguatan transparansi dan akuntabilitas: Seluruh SPPG diwajibkan memiliki platform digital yang dapat diakses publik, mencakup laporan keuangan, menu harian, dan data gizi. Pembentukan dewan pengawas independen yang

melibatkan ahli gizi, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan akan memperkuat nilai amanah dalam tata kelola program.

Keempat, diversifikasi pendanaan dan penerapan instrumen ekonomi Islam: Selain APBN dan APBD, optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga amil zakat resmi dapat menjadi sumber pendanaan yang tidak membebani fiskal negara. Pendekatan ini juga memperkuat dimensi aksiologis program dengan mengintegrasikan nilai-nilai redistribusi Islam dalam arsitektur pendanaan MBG.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji polemik kebijakan Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kalimantan Tengah melalui analisis isi kualitatif terhadap corpus narasi pemberitaan dan dokumen kebijakan, dengan menggunakan kerangka filosofis ekonomi Islam (ontologi, epistemologi, aksiologi) sebagai pisau analisis. Analisis mengidentifikasi enam tema polemik utama: anggaran, ketersediaan pangan, distribusi, kualitas menu, koordinasi kelembagaan, dan transparansi.

Dari perspektif filosofis ekonomi Islam: secara ontologis, tujuan MBG selaras dengan prinsip pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyat) dan kewajiban negara sebagai khalifah; namun realitas implementasi belum mencerminkan keselarasan ini. Secara epistemologis, kelemahan basis data pengambilan keputusan dan lemahnya sistem monitoring-evaluasi merupakan persoalan yang harus segera diatasi agar kebijakan berjalan sesuai prinsip amanah. Secara aksiologis, ketimpangan distribusi spasial dan absennya transparansi anggaran menunjukkan bahwa nilai 'adl dan masalah belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi program.

Analisis ekonomi mikro-makro menunjukkan bahwa MBG memiliki potensi dampak positif yang signifikan—baik bagi petani lokal maupun pembangunan sumber daya manusia jangka panjang—namun membutuhkan manajemen fiskal yang prudent dan penguatan rantai pasok pangan lokal. Penelitian ini merekomendasikan empat langkah strategis: penguatan basis data, percepatan pemerataan SPPG, penguatan transparansi-akuntabilitas, dan diversifikasi pendanaan melalui instrumen ekonomi Islam. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan, efektivitas, dan keadilan program MBG di Kalimantan Tengah.

REFERENSI

- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program Makan Bergizi Gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 16(3), 53-113. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju generasi emas 2045. *ENTITA Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>
- Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis implementasi program Makan Bergizi Gratis terhadap perkembangan ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 9(2), 43-122. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. International Institute of Islamic Thought.
- Berg, B. L. (2007). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (6th ed.). Pearson.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Febriyanti, A., Wulansari, R., Purnama, T. Z., & Khoirunisa, F. (2025). Kolaborasi multi-aktor dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Magelang. *Journal of Governance and Public Administration*. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i1.3289>
- Fikri, A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif konstitusionalisme. *JUSTICIA SAINS Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 48-189. <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i2.4576>
- Firmansyah, M., Saepiani, A., & Fadil, I. (2025). Analisis sentimen publik program Makan Bergizi Gratis menggunakan support vector machine. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*. <https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i4.805>
- Haikal, M., & Erfina, A. (2026). Analisis sentimen warganet terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan model IndoBERT. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*. <https://doi.org/10.58344/locus.v5i3.5253>
- Hakim, B. N., & Yuliana, W. (2025). Implikasi yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis. *Ekspose Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 10(4), 75-133. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10485>
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277-1288.
- Jalaludin, A., Istighfaroh, F., & Musta'ana. (2026). Dinamika collaborative governance dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bojonegoro. *PAPATUNG Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan dan Politik*. <https://doi.org/10.54783/japp.v9i1.1514>
- Kahf, M. (1989). Zakat: Unresolved Issues in Contemporary Fiqh. *Journal of Islamic Economics*.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, 5(2), 11-135. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>

- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial–Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Hodder & Stoughton.
- Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. *Forum: Qualitative Social Research*, 1(2), Art. 20.
- Nasution, P. S. A. (2026). Analisis isi kepedulian sosial dalam pemberitaan program Makan Bergizi Gratis di Kompas.id. (Skripsi). Universitas Jember.
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. The Islamic Foundation.
- Qomarrullah, R., Suratni, S., Wahyu, S. L., & Sawir, M. (2025). Dampak jangka panjang program Makan Bergizi Gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 18(4), 22-121. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i2.660>
- Ramadhan, N. G., & Khoirunnisa, A. (2025). An integrated random forest for analyzing public sentiment on the Makan Bergizi Gratis program. *Journal of Information Systems and Informatics*, 19(3), 77-162. <https://doi.org/10.51519/journalisi.v7i3.1184>
- SSGI (2024), Survei Status Gizi Indonesia dalam Angka, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
- Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis ditinjau dari tanggung jawab negara. *Juris Humanity*. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84>
- Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). Tinjauan kritis tentang program Makan Bergizi Gratis terhadap produktivitas belajar siswa. *Katalis Pendidikan*, 7(3), 39-182. <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1428>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.
- Virlana, B., & Tjoneng, A. (2025). Kepastian hukum program Makan Bergizi Gratis: Kajian atas usulan pemanfaatan dana zakat. *MORALITY Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 25-157. <https://doi.org/10.52947/morality.v1i1.975>
- Widyadhana, N. M., Putry, R. A., & Widyadhana, N. M. (2025). Tinjauan nilai gizi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI. *Jurnal Kesehatan Tambusai*. <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i4.51554>